

solidarity grocer, the re-negotiation between local communities, government, and retail shop owners modern, growing awareness of the critical community could encourage the birth of a social movement, and the opening of the society's perspective on the strategy of strengthening and development of their economic activity.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
ellykismini@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dengan statusnya tersebut, sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Di satu sisi, Indonesia telah memasuki babak baru persaingan bebas dalam sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, permasalahan muncul dengan masuknya sistem pasar modern di dalam negeri. Berbagai strategi telah dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia mandiri, khususnya dalam sektor ekonomi. Strategi yang dimaksud adalah pemerintah telah mengatur pertumbuhan dan persaingan antara perekonomian yang dilakukan oleh pedagang lokal dengan pedang yang beromset besar bersistem dan bermanajemen waralaba. Salah satu diantaranya adalah hadirnya peraturan yang mengatur perkembangan waralaba, yaitu PP nomor 42 tahun 2007. Lahirnya PP nomor 42 tahun 2007 adalah sebagai upaya untuk melindungi perekonomian kecil/rakyat agar tidak kalah bersaing dengan ritel modern berbasis waralaba. Dalam praktiknya, hakikat hadirnya sebuah peraturan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak pedagang lokal yang berbentuk kelontong merasa dirugikan dengan hadirnya ritel modern. Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya peraturan yang bertujuan untuk memayungi per-

ekonomian lokal tidak fungsional.

Ironinya, ketidakfungsionalan UU 42 tahun 2007 tidak banyak ditindak oleh pemerintah. Bahkan seakan-akan wakil rakyat yang menduduki jabatan struktural justru memihak perkembangan waralaba. Kondisi seperti ini terbukti dengan adanya surat izin mendirikan waralaba. Selain itu, jarak waralaba yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, baik jarak waralaba dengan waralaba maupun dengan pasar tradisional rakyat. Kondisi demikian pun terjadi di daerah Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang. Implementasi kebijakan tersebut dinilai memihak pemilik modal dan kelas kapitalis untuk memarginalkan per-ekonomian rakyat yang dijalankan oleh para pedagang kelontong kecil.

Hadirnya Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Sekarang telah menstimulus waralaba untuk mengembangkan usahanya di daerah Sekarann. Dengan banyaknya waralaba yang berdiri di daerah Unnes telah melahirkan pergulatan antara pedagang kelontong dan waralaba. Tidak sedikit pedagang kelontong yang mengalami penurunan pendapatan dan gulung tikar. Keberpihakan pemerintah lokal pada waralaba mendorong para pedangan kelontong untuk membentuk sebuah perkumpulan yang mewadahi aspirasi dan

permasalahan ekonomi rakyat sebagai akibat hadirnya waralaba di Sekaran. Perkumpulan pedagang kelontong Sekaran yang dimaksud adalah Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran (PPLS).

Banyak penelitian yang membahas tentang pertarungan ekonomi antara pedagang tradisional dan pasar moder yang berbentuk ritel, seperti Indomaret, Alfamart, dan Ecomart. Dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya menggambarkan bagaimana ketidakberdayaan ekonomi tradisional sampai pada bagaimana model strategi yang dilakukan oleh pedang lokal dalam menghadapi ritel modern. Akibatnya, riset hanya sekedar mendeskripsikan hasil temuan tanpa memberikan pemikiran kritis untuk melahirkan solusi yang tengah dihadapi masyarakat yang diteliti. Beberapa hasil penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang menunjukkan bahwa menjamurnya pasar ala waralaba mengakibatkan matinya ekonomi rakyat setempat. Hasil-hasil ini pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia terutama di negara-negara Berkembang (lihat Reandon et al (2003) dan Trail (2006). Bahkan dari hasil deskripsi ada yang hanya menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang tradisional, tanpa mampu menangkap isu baru yang muncul dengan adanya ritel modern. Seperti tulisannya Saroso yang mendeskripsikan perkembangan bisnis waralaba di Indonesia terus meningkat. Kenyataan perkembangan waralaba sudah membanjiri di Indonesia adalah dengan hadirnya KFS dan Pizza Hut di beberapa pusat kota. Saat ini, warala tidak terkonsentrasi saja di pusat-pusat kota besar, melainkan di beberapa daerah peasant juga

menjadi target perluasan (Sarosa, 2006:3). Tulisan-tulisan bertemakan di atas, sebenarnya merupaka isu-isu melainkan isu lama dalam bingkai persaingan pasar antara rite modern dan pedang tradisional. Sementara Hutomo (Anonim, 4-5) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perekonomian tradisional termasuk apa yang dilakukan oleh para pedangan kelontong merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam mewujudkan perekonomian kerakyatan di Indonesia. Sejalan pemikiran dengan Hutomo, Mubyarto juga menjelaskan bahwa konseskuensi ekonomi kerakyatan Indoensia harus melakukan keberpihakan dan perlindungan penuh kepada ekonomi rakyat sebagai operasionalisasi sistem perekonomian di Indonesia (dalam Najmumunir, 2007).

Studi lain yang berusaha menjelaskan fenomena di atas adalah Soliha (2008) yang membuat analisis industri ritel modern di Indonesia. Menurutnya, persaingan antara ritel tradisional dan modern terjadi dalam perebutan konsumen dan menawarkan perubahan pola konsumsi. Soliha lebih lanjut mnejelaskan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial terhadap perkembangan pasar ritel dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan adanya wisatawan mancanegara yang masuk ke Indosia. Berdasarkan beberapa literature di atas, belum ada jenis penelitian yang berusaha melihat pergerakan akar dalam merespon pertumbuhan ritel modern di daerah. Atas dasar rujukan di atas, maka PPLS sebagai perkumpulan dari para pedagang akan dilihat bagaimana peranannya dalam memperjuangkan hak-hak dan keberlangsungan usaha ekonomi rakyat di daerah Sekaran.

Kehadiran waralaba membuat masyarakat lebih kreatif, tidak hanya dalam barang produksinya tetapi juga cara/strategi untuk mempertahankan perekonomiannya. Scoot (1983) menjelaskan bahwa mekanisme survival merupakan upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya. Upaya untuk survival tersebut dapat dilakukan melalui berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau bermigrasi serta upaya terakhir menggunakan jaringan-jaringan sosial yang berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghadapi kondisi-kondisi terburuk di masa-masa yang akan datang (Rachmawati, 2013:21-22). Dari kondisi ini apabila ditarik dengan kasus masyarakat Sekaran dapat dijelaskan bahwa kasus demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dengan berjualan dalam bentuk kelontong/warung dapat dibaca sebagai strategi masyarakat lokal dalam meresistensi perkembangan waralaba di Sekaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan logika berpikir induktif. Adapun data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan lapangan dan sinergi logika berpikir, maka terbentuklah etnografi baru berdasarkan permasalahan, yaitu tentang peran PPLS dalam menggerakkan perekonomian lokal di tengah arus pembangunan ritel modern yang

ada di Sekaran. Sajian data yang disampaikan bersifat informatif dengan disertai analisis berdasarkan hasil temuan penelitian dan teoretisnya. Hasil etnografi yang terpublikasikan dapat menjadi bahan penting untuk merumuskan kebijakan terkait pengentasan masalah sosial melalui gagasan kreatif dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya masalah tentang perekonomian rakyat dalam belenggu kapitalisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPLS dalam Pergulatan Ekonomi Kerakyatan di Sekaran

Sejak berkembang menjadi pusat pendidikan, Kalurahan Sekaran merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan beberapa aspek seperti peningkatan taraf pendidikan masyarakat, penambahan jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat ditandai dengan adanya program sejenis afirmasi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang memberikan kesempatan bagi penduduk lokal untuk mengenyam pendidikan tinggi di Unnes. Hal ini membuat masyarakat semakin bersemangat dalam menyekolahkan anak-anak mereka secara formal.

Pada aspek penambahan jumlah penduduk, perubahan yang terjadi di Sekaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor natalitas dan fertilitas, tetapi juga pada faktor migrasi penduduk. Banyak penduduk dari daerah lain yang memilih bertempat tinggal di Sekaran karena mereka bekerja di Unnes atau

mendirikan usaha di wilayah Sekaran yang dianggap cukup potensial untuk berbisnis. Tidak hanya itu, kehadiran mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air yang *ngekos* atau mendiami wilayah Sekaran dalam kurun waktu tertentu juga menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah Sekaran bertambah ramai. Kondisi ini membuat beberapa tempat di wilayah Sekaran yang dahulu merupakan pekarangan rumah penduduk dan areal pertanian, berubah menjadi tempat jualan, rumah kos-kosan, dan perumahan penduduk. Alih fungsi lahan ini dapat dilihat sebagai konsekuensi dari penambahan penduduk dan perubahan basis kehidupan masyarakat di Sekaran, dari pertanian menjadi bisnis dan perdagangan.

Sebelum Unnes ada, wilayah Sekaran dikenal sebagai wilayah sentra produksi komoditas pertanian seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Perkembangan masyarakat dan wilayah setelah Unnes berdiri merupakan peluang pengembangan mata pencaharian di luar sektor pertanian yang menjadikan masyarakat di Sekaran mulai merambah pada sektor lain, seperti usaha dagang dan jasa. Beberapa warga masyarakat terlihat menyulap pekarangan mereka menjadi warung dagang, mulai dari toko kelontong, usaha salon, usaha laundry, warung makan, hingga counter handphone (Hp). Ada beberapa warung dagang yang mereka gunakan sendiri tetapi adapula yang mereka sewakan ke orang lain. Dengan pengembangan sistem mata pencaharian tersebut, masyarakat di Sekaran memiliki penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan tarafhidup mereka.

Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Sekaran khususnya

para pedagang kelontong merasa terusik dengan kehadiran ritel atau waralaba modern. Beberapa pedagang kelontong mengeluhkan turunnya pendapatan mereka dan bahkan ada beberapa warung kelontong yang terpaksa gulung tikar.

“Usaha saya sih lancar-lancar saja mba, Lancarnya seperti ini mba, dengan adanya UNNES dan Perumahan tentu banyak yang membeli sembako, jadi tidak menutup kemungkinan warga Sekaran ini membeli di toko saya, meskipun hanya beberapa yang datang untuk membeli namun toko saya ini tetap laku. Akan tetapi ada sedikit beberapa masalah. Saya ini merupakan pendatang baru di desa sekaran, saya mempunyai usaha seperti ini pun banyak sekali saingannya baik diantara sesama pedagang kelontong dan masalah dengan adanya minimarket (Ibu Lina, 42 Tahun, Pedagang Kelontong, 21 September 2014).

Persaingan dengan ritel atau waralaba modern yang mereka anggap tidak seimbang, merupakan masalah pelik yang harus mereka hadapi. Kemerostan usaha dan penurunan penghasilan yang banyak dialami oleh pedagang kelontong membuat mereka membentuk perkumpulan yang mereka sebut sebagai Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran (PPLS). Perkumpulan ini beranggotakan pedagang kelontong yang tinggal di Kelurahan Sekaran dan terdiri atas pedagang laki-laki dan pedagang perempuan. Menurut Afrokhi (52 tahun), ketua PPLS kehadiran PPLS merupakan wujud keresahan masyarakat karena pemerintah dianggap

lamban mengantisipasi serbuan ritel modern yang berpotensi mematikan usaha rakyat.

Peran dan Aktifitas PPLS dalam Menguatkan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Sekaran

Sebagai paguyuban yang berangkat dari keresahan warga akan ancaman modal asing yang besar terhadap usaha ekonomi mereka, kehadiran PPLS dirasakan oleh pedagang kelontong di Sekaran seperti hujan di musim kemarau yang panjang. Betapa tidak, wilayah yang dahulu terisolir karena akses ke kota dan ke pusat-pusat ekonomi yang lain sangat terbatas, mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan setelah Unnes dibangun. Berangkat dari kondisi ini, maka beberapa orang warga Sekaran yang tergabung dalam PPLS (Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran) tidak tinggal diam. Mereka melakukan upaya-upaya untuk membentengi lingkungan mereka dari ekspansi kaum kapitalis asing yang bermodal besar dan telah memarginalkan usaha-usaha ekonomi masyarakat local. Upaya-upaya tersebut diwujudkan berdasarkan peran yang mereka mainkan antara lain:

Menjadi perkumpulan masyarakat lokal untuk menampung aspirasi dan menjadi wadah untuk eksistensi ekonomi masyarakat Sekaran.

Dalam wadah PPLS, para pedagang kelontong dapat menyalurkan aspirasi dan keresahan mereka akibat kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dengan usaha ritel modern. Mereka yang telah mengalami gulung tikar dari usaha kelontong serta mereka yang mengalami penurunan

penghasilan yang cukup signifikan akibat kedatangan toko ritel modern menggalang kekuatan agar usaekonomi masyarakat di Sekaran dapat tetap eksis. Bapak Afrokhi, ketua PPLS menyatakan bahwa beberapa pedagang warung kelontong saat ini yang menggabungkan diri pada PPLS (Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran) karena mereka merasa usaha kelontong merka akan tetap berdiri dan berkembang apabila bergabung dengan PPLS maka. Mereka merasa terjamin karena terdapat perlindungan dari PPLS, sebab paguyuban ini mampu mengutamakan usaha local dan menentang usaha asing berdiri di wilayah Sekaran

Menjadi Media Kontrol terhadap Kebijakan pemerintah dan pihak-pihak terkait

Menjamurnya toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Sekaran yang menyebabkan jatuh banggunya usaha kelontong mereka tidak hanya disebabkan oleh tindakan penduduk lokal yang menjual atau menyewakan tanah mereka kepada pihak toko ritel modern tersebut. Bagi PPLS, hal ini sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah yang kurang tegas dalam menegakkan aturan serta kurangnya kepedulian mereka akan nasib para pedagang kelontong. Ibu Jumi'atun menilai bahwa pemerintah cenderung tidak terbuka berdirinya ritel modern di daerah Sekaran. Ketidakterbukaan tersebut terlihat dari tertutupnya pemerintah Sekaran dalam menyosialisasikan pendirian Indomaret. Ketidakterbukaan tersebut berakibat pada konflik internal antara pihak PPLS dan pihak kelurahan. Pemerintah dianggap oleh Ibu Jumi'atun kurang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh

ritel modern. Hal tersebut dikuatkan dengan masih adanya Indomaret dan Alfamart yang berdiri di sekitar sekaran.

Ketidaktegangan pemerintah dan ketidaksamaan visi masyarakat (khususnya para pemilik tanah) akan penguatan ekonomi kerakyatan merupakan faktor utama yang menyebabkan menjamurnya toko ritel modern di Sekaran. Bagi PPLS, sebagai pelayan masyarakat, pemerintah seharusnya lebih mendahulukan kepentingan warganya ketimbang kepentingan investor asing. Tetapi yang terjadi selama ini, investor asing justru selalu difasilitasi jika akan membuka gerai baru. Hal inilah yang membuat PPLS melakukan aksi protes dengan mempertanyakan secara langsung masalah ini dengan kelurahan. Mereka menuntut pihak kelurahan agar dapat menegakkan kembali aturan yang telah diberlakukan, yakni adanya pembatasan pendirian ritel modern atau bahkan pelarangan pendiriannya. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah berperan secara maksimal dalam membela masyarakat Sekaran agar ekonomi kerakyatan dapat terbangun dengan kuat di Sekaran.

Menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha kelontongannya menjadi ritel lokal agar dapat berdaya saing dengan ritel modern.

Melihat system penjualan dan manajemen usaha yang dilakukan oleh toko ritel modern, PPLS ternyata memiliki keinginan untuk mengelola dan memiliki toko yang dirancang sama dengan ritel modern tersebut. Bagi anggota PPLS, banyaknya konsumen yang berbelanja di

Alfamart dan Indomaret hanya disebabkan oleh fasilitas dan kenyamanan berbelanja yang mereka dapat. Jika terkait dengan harga, mereka menjamin harga yang pedagang kelontong lokal berikan dapat bersaing dengan toko ritel modern, bahkan cenderung lebih murah. Hanya saja mindset belanja konsumen saat ini mulai bergeser. Mereka tidak lagi hanya memperhatikan harga semata tetapi juga fasilitas dan kenyamanan dalam berbelanja. Berkaca dari hal tersebut, maka PPLS melihat bahwa salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk menguatkan kembali ekonomi kerakyatan adalah para pedagang kelontong ini dapat menata kembali toko kelontong mereka seperti toko ritel modern agar dapat menarik kembali perhatian konsumen. Bagi PPLS, langkah ini dapat menjadikan warung kelontong sebagai ritel lokal yang berbasis pada usaha masyarakat dan mampu bersaing secara sehat dengan ritel modern.

Dalam menjalankan perannya ini, PPLS senantiasa mengajak seluruh warga Sekaran untuk bersatu padu dalam membangkitkan usaha ekonomi mereka di tengah gempuran investor asing yang cenderung monopolistik dan kapitalistik. Saat ini, upaya yang telah mereka lakukan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah, LSM, dan beberapa pihak terkait, sehingga perjuangan mereka tidak lagi dianggap remeh. Oleh karena itu, untuk memantapkan peran tersebut, maka aktifitas yang sering dilakukan oleh PPLS yaitu melakukan perkumpulan untuk membahas masalah yang muncul seiring hadirnya ritel di Sekaran. Hasil diskusi biasanya disampaikan kepada pihak kelurahan Sekaran dan pihak ritel modern baik Alfamart maupun

Indomaret. Hal ini ditempuh oleh masyarakat dengan melalui mediator. Selain dengan perkumpulan yang membahas khusus tentang masalah yang pedagang kelontong hadapi, biasanya PPLS juga melakukan bakti sosial dalam bentuk penghijauan. Program kerja ini dilakukan dengan tujuan menjaga ekosistem lingkungan juga untuk mem-pererat solidaritas diantara pedagangan kelontong dan masyarakat yang mempunyai visi yang sama.

Implikasi dari Keberadaan PPLS terhadap Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Sekaran

Seperti Sejak berdirinya PPLS, para pedagang kelontong di Sekaran senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menjaga eksistensi usaha mereka. Tidak hanya langkah pereventif yang terapkan seperti melakukan serangkaian strategi bisnis yang sehat, tetapi juga langkah proteksi dan aksi protes kepada pihak-pihak terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, PPLS tidak lagi dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak. Sebaliknya, posisi tawar mereka semakin kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa implikasi dari keberadaan PPLS (Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran), yakni:

Menguatnya Solidaritas Sesama Pedagang Kelontong

Sebelum PPLS didirikan, pedagang kelontong di Sekaran menjalankan usaha ekonomi mereka secara konvensional dan cenderung individualistik. Usaha ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang dianggap

sebagai urusan pribadi. Maju mundurnya usaha yang mereka lakukan adalah urusan pribadi, bahkan tidak jarang diantara mereka menganggap bahwa satu dengan yang lainnya adalah pesaing bisnis. Ketika toko ritel modern beroperasi di Sekaran, mereka lalu tersadar bahwa pesaing bisnis mereka tidak hanya sesama pedagang kelontong yang memiliki modal yang seimbang, tetapi pesaing tersebut adalah investor asing yang memiliki modal yang besar.

Bagi pedagang kelontong di Sekaran, persaingan antar sesama pedagang kelontong local yang lain adalah hal yang wajar karena berangkat dari modal usaha yang tidak jauh berbeda sehingga mereka bisa bersaing secara sehat. Tetapi persaingan dengan toko ritel modern menurut mereka adalah persaingan yang tidak seimbang. Modal usaha yang besar serta gerai yang bertebaran hampir di semua sudut Sekaran membuat pedagang kolntong dapat tergusur secara perlahan. Toko ritel modern ini seolah dianggap musuh bersama yang harus dihadapi bersama. Untuk mengahadapinya, para pedagang kelontong sadar bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tetapi harus dilawan dengan persatuan dan kebersamaan pedagang kelontong. Untuk itu, maka terbentuknya PPLS di lingkungan mereka mampu memperkuat solidaritas warga untuk menyikapi persoalan dan musuh bersama mereka. Hanya saja menurut ibu Jumi'atun (40 Tahun), salah seorang pengurus PPLS, kelemahan PPLS saat ini adalah kurang rutinnya kegiatan yang dilakukan. Para pedagang kelontong hanya berkumpul apabila ada gejolak, seperti adanya pembangunan Alfamart dan Indomaret baru. Meski demikian,

komunikasi melalui media *handphone* tetap mereka lakukan sehingga solidaritas yang mereka galang dapat tetap terjaga.

Terjadinya renegoisasi antara Masyarakat Lokal, Pemerintah, dan Pihak Toko Ritel Modern

Sejak ditandatanganinya Surat Ketetapan Bersama atau Nota Kesepahaman antara PPLS dengan Manager PT.Sumber Alfaria Trijaya pada tahun 2009, maka langkah PPLS dalam menyuarkan aspirasi dan masalah yang dihadapi oleh pedagang kelontong di Sekaran semakin lantang. Dalam nota kesepahaman tersebut diterangkan bahwa pihak Alfamart tidak boleh memberlakukan program hadir 24 jam, tidak menambah gerai baru dalam radius 2,5 km, tidak akan memperpanjang kontrak gerai di Jalan Mr.Koesbiyono selama 5 tahun, harus memperhatikan keberlanjutan usaha pedagang kelontong dengan membukakan akses, memprioritaskan warga untuk antuan social lainnya kepada warga Sekaran. Butir-butir dari nota kesepahaman tersebut secara jelas memperjuangkan kepentingan dan penguatan ekonomi masyarakat Sekaran. Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, butir-butir dalam nota kesepahaman ini seringkali dilanggar dan tidak diindahkan oleh toko ritel modern. Beberapa pembangunan gerai Alfamart dan Indomaret tetap saja berjalan.

Pendirian gerai baru Alfamart dan Indomaret di Sekaran sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh pihak luar saja, tetapi dengan sistem *français* yang melibatkan 2 (dua) pihak, maka memungkinkan warga Sekaran untuk mendirikannya. Hal ini

dilakukan oleh Bowo (42), salah seorang warga Sekaran. Menurut Bowo, keputusannya untuk mendirikan gerai Indomaret baru di Sekaran karena dia akan berperan sebagai pihak pertama yang menyediakan modal, lokasi, dan peralatan penjualan. Sedangkan pihak Indomaret merupakan pihak kedua yang menyediakan stok barang dan karyawan. Hal ini berbeda dengan kebanyakan Indomaret lainnya dimana pihak Indomaret hanya menyewa lahannya saja. Dengan berbekal lahan yang dimiliki mertuanya, maka Bowo memutuskan untuk mendirikan Indomaret.

Berdirinya Indomaret baru, bukan hanya keputusan sepihak dari Bowo. Sebelum pembangunan Indomaret dilakukan Bowo telah memberitahukan kepada para pedagang yang menempati lahannya untuk pindah dan meminta persetujuan warga melalui tanda tangan. Lahan yang digunakan Bowo untuk membangun Indomaret sebelumnya ditempati oleh beberapa pedagang yang mengontrak. Karena masa kontrak habis dan Bowo memiliki tujuan untuk membangun Indomaret, maka para pedagang diminta untuk tidak memperpanjang masa kontrak dan diberi waktu untuk pindah. Selain itu, untuk memperkuat perizinan Bowo meminta tanda tangan kepada warga Sekaran dan mendapatkan persetujuan dari warga sebanyak 90%. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Suharto (52 tahun), ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Sekaran bahwa masyarakat telah setuju dengan dibangunnya Indomaret ini.

Isu pendirian gerai Indomaret baru yang dilakukan oleh Bowo ini didengar oleh pihak PPLS. Para pengurus PPLS kemudian menginvestigasi dan mengobservasi pem-

bangunan gerai Indomaret baru tersebut. Setelah mendapatkan hasilnya, mereka kemudian melakukan koordinasi untuk membahas kasus pendirian gerai baru tersebut yang selanjutnya menjadi landasan dan dasar mereka untuk melakukan reneogisasi dengan pemerintah dan pihak terkait.

Di pihak lain, Mas Bowo juga menyadari bahwa izin usaha yang diberikan oleh Ketua RT nampaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bowo mengakui bahwa perizinan resmi dari pihak Indomaret belum diterima oleh Bowo karena membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan. Tetapi bagi pihak Kelurahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muh Sholeh (50 Tahun) bahwa Mas Bowo juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena dia tidak mengetahui adanya pembatasan pendirian Indomaret di Sekaran. Dari usaha reneogisasi antara PPLS, Kelurahan, Mas Bowo, dan pihak Indomaret ini, menghasilkan kesepakatan bahwa Mas Bowo dapat melanjutkan usaha kelontongnya tetapi tidak memakai nama Indomaret dan tidak menerapkan system bisnis *ala* Indomaret tersebut.

Tumbuhnya Kesadaran Kritis Masyarakat yang Mampu Mendorong lahirnya Gerakan Social

Di Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Sekaran, sampai saat ini Pemerintah Daerah belum mengeluarkan sebuah kebijakan yang membatasi pendirian ritel modern. Akibatnya, ritel modern menjamur di semua sudut kota. Daerah yang dianggap baru berkembang pun, seperti di

Kelurahan Sekaran tidak luput dari gempuran ritel modern. Dengan kondisi ini, para pedagang kelontong di Sekaran merasakan adanya ancaman yang cukup serius bagi keberlangsungan usaha mereka. Mereka menganggap Pemerintah berlaku tidak adil bagi mereka.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kelurahan Sekaran memberikan penjelasan bahwa mereka sudah melakukan monitoring terhadap perkembangan ritel modern, tetapi ternyata berkas izin usaha yang diberikan ke kelurahan tidak secara detail mengatakan bahwa usaha tersebut adalah ritel modern. Setelah izinnya keluar, pihak kelurahan baru mengetahui bahwa usaha tersebut adalah ritel modern.

Terlepas dari adanya masalah dalam pelaksanaan prosedur perizinan ini, pendirian ritel modern tersebut menyulut kekecewaan warga, khususnya pedagang kelontong. Kekecewaan warga ini kemudian berujung pada aksi protes yang mereka luncurkan ke Pemerintah Daerah, dalam hal ini ke Kelurahan Sekaran yang memberikan izin usaha bagi ritel modern tersebut. Mereka mendatangi Kantor Kelurahan Sekaran untuk menuntut pemerintah agar lebih meninjau ulang izin usaha tersebut dan lebih memperhatikan aspirasi warga Sekaran.

Langkah yang mereka lakukan ini didasarkan atas kesadaran kritis yang terbangun karena adanya masalah ketimpangan struktural yang mereka rasakan. Dalam teori marxisme, masyarakat lokal di Sekaran telah mengalami gejala *capitalism enclosure* yakni terdesak dan tersingkirnya masyarakat local akibat masuknya kapitalisme di Daerah mereka. Pelaku kapitalisme dari luar kemudian melakukan

kerja sama dengan kelas kapitalis lokal, yakni para tuan tanah. Kondisi inilah yang menyebabkan ritel modern dapat beroperasi dengan lancar di Sekaran. Kasus Mantu Lanang seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya merupakan contoh yang menggambarkan kerja sama kelas kapitalis tersebut. Bagi pedagang kelontong lokal, baik asli maupun pendatang yang tidak memiliki modal yang cukup besar, kondisi ini merupakan keadaan yang tidak seimbang secara struktural. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kekuatan kontrol dari pemerintah. Untuk itulah, maka PPLS bergerak sebagai kekuatan akar rumput dalam rangka mengontrol kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan dagang di Sekaran. Bapak Afrokhi juga mengungkapkan bahwa walaupun pihak PPLS dan pihak ritel modern pernah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), tetapi perhatian pemerintah daerah tampaknya belum dapat menjawab aspirasi pedagang lokal di Sekaran.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pedagang kelontong di Sekaran merasa bahwa persaingan mereka dengan ritel modern tidak seimbang sebab mereka harus berhadapan dengan pemodal raksasa dengan sistem *franchise* yang canggih sehingga dapat menancapkan kukunya di mana-mana. Dalam hal ini jika dilihat dalam perspektif sistem ekonomi global, maka ritel modern tersebut merupakan representasi dari agen neoliberalisme yang tengah berkontestasi dengan pelaku bisnis lokal. Ketidakseimbangan struktural yang mereka rasakan ini akhirnya menumbuhkan kesadaran kritis mereka untuk berrefleksi atas masalah yang mereka alami, dan

melakukan tindakan untuk melawannya. Para pedagang kelontong yang tergabung dalam PPLS tersebut menganggap bahwa perlawanan yang mereka lakukan tidak cukup jika hanya memperbaharui cara mereka berjualan, tetapi juga ada intervensi pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada mereka sebagai pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, perjuangan mereka dalam bingkai PPLS ini dapat dianggap sebagai sebuah gerakan sosial untuk mengontrol dan memproteksi eksistensi usaha mereka di tengah menguatnya jeratan neoliberalisme di lingkungan mereka.

Terbukanya Cara Pandang Masyarakat Mengenai Strategi Penguatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Mereka.

Konfrontasi yang dilakukan oleh PPLS dengan toko ritel modern ternyata tidak hanya berujung pada resistensi mereka terhadap keberadaan toko ritel modern. Dibalik aksi penolakan tersebut terselip pengalaman yang menjadikan mereka selalu mempelajari cara dan strategi berbisnis yang dikembangkan oleh ritel modern, mulai dari penataan barang, *quality control*, manajemen yang baik, fasilitas yang nyaman, hingga pelayanan yang ramah. Melalui cara ini, para pedagang kelontong tersebut terinspirasi untuk membuka toko kelontong dengan manajemen modern. Beberapa toko kelontong tampaknya sudah mempraktikkannya, yang terlihat pada penataan barang mereka yang ditata semenarik mungkin serta mempergunakan sistem swalayan.

Dalam persaingan bisnis yang melibatkan ritel modern dengan pedagang lokal ini, strategi adaptasi sangat penting

dimiliki oleh pedagang kelontong agar usaha mereka dan *survive*. Menurut Scott, (1983), resistensi adalah semua tindakan dari anggota masyarakat kelas bawah dengan maksud untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain itu menurut Scott, penyebab resistensi berupa perilaku manusia dan perubahan lingkungan yang membuat masyarakat petani melakukan resistensi. Penetrasi kekuatan pemodal yang menyebabkan transformasi budaya dalam kehidupan desa mendorong para petani melakukan resistensi.

Jika diakitikan dengan realitas yang terjadi di Sekaran, maka resistensi yang dilakukan oleh pedagang local melalui PPLS merupakan upaya yang mereka lakukan untuk melawan dominasi kaum pemodal yang saat ini sudah menggurita di berbagai pelosok negeri. Oleh karena itu, resistensi ini juga dapat dimakanai sebagai upaya control dan proteksi dari ancaman pemodal besar yang datang dari luar daerah mereka. Menurut PPLS, jika tidak ada uapaya resistensi maka ritel modern tersebut secara lebih leluasa akan meminggirkan usaha-usaha ekonomi rakyat.

Selain resistensi, kehadiran ritel modern ini juga membuat masyarakat lebih kreatif, tidak hanya dalam barang produksinya tetapi juga cara/strategi untuk mempertahankan perekonomiannya. Scoot mejelaskan mekanisme survival sebagai upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya. Upaya untuk survival tersebut dapat dilakukan melalui berjualan barang-barang yang tidak dijual di ritel modern seperti sayur mayor, plastic, dan alat-alat rumah tangga. Begitupun halnya imitasi pada aspek

penataan barang dan strategi penjualan yang dilakukan oleh pedagang kelontong terhadap ritel modern. Upaya terakhir mereka lakukan agar pelanggan dan konsumen dapat berbelanja di toko mereka dengan aman dan nyaman.

SIMPULAN

Masalah utama yang dirasakan oleh pedagang kelontong di Sekaran adalah menjamurnya ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang membuat usaha ekonomi mereka mengalami penurunan yang cukup drastis. Peran yang dilakukan oleh PPLS dalam menguatkan ekonomi rakyat di Sekaran adalah dengan menjadikan PPLS sebagai wadah berhimpun masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kontronya terhadap pemerintah serta untuk mengembangkan usaha ekonomi mereka agar dapat bersaing dengan ritel modern. Sedangkan aktifitas yang sering mereka lakukan adalah konsolidasi anggota dan pemilik toko kelontong, kerja bakti dan penghijauan. Impilaksi dari peran PPLS tersebut adalah mampu membentuk kesadaran kritis masyarakat akan situasi yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat melakukan upaya proteksi terhadap hal-hal yang mengancam sistem ekonomi mereka serta upaya kontrol terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Hutomo, Mardi Yatmo. 2001. *Konsep Ekonomi Kerakyatan* dalam Majalah PPEdisi 25.

- Najmumunir, Nandang. 2007. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Penguatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Madani*. November, Vol. 2, No., pp 1-20.
- Rachmawati, Dewi Fitria. 2013. Strategi Survival Petani Tambak di Tengah Bencana Industri Lumpur Lapindo di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Malang. Sosiologi Lingkungan, FISIP, Brawijaya.
- Reardon, Thomas et al (2003) 'The Rise of Supermarkets in Africa, Asia, and Latin America' [Perkembangan Supermarket di Afrika, Asia, dan Amerika Latin]. *American Journal of Agricultural Economics*. 85, (5).
- Sarposa, Pietra. 2006. *Kiat Praktis Membuka Usaha: Mewaralabakan Usaha Anda, Panduan Praktis dan Komprehensif Mengembangkan Usaha dengan Sistem Waraaba*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Scoot, James C. 1985. *Weapons of The Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Heaven and London: Yale Univeristy Press.
- Soliha, Euis. 2008. Analisis Industri Ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. September, Vol. 5, No. 2, pp 128-142.
- Trill, W. Bruce (2006) 'The Rapid Rise of Supermarkets?' [Perkembangan Pesat Supermarket?] *Development Policy Review* 24, (2).